

**Bantuan Beras 30 Kg
Menjangkau Warga di 70 Desa
dan Kelurahan di Buton
Selatan, Bulog Pastikan Beras
Gratis, Bupati H Muh Adios
Minta Bantuan Beras
Disalurkan Tepat Sasaran**



Laporan: Ardi

BUTON SELATAN, BP- Sebanyak 30 kilogram beras mulai disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat di Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, untuk memenuhi kebutuhan pangan selama tiga bulan. Bantuan pemerintah pusat itu mencakup alokasi Juli, Agustus, dan September 2026 serta diberikan secara gratis kepada warga di 70 desa dan kelurahan. Penyaluran tersebut secara resmi diluncur-

kan Bupati Buton Selatan H. Muhammad Adios, S.Sos., M.B.A. bersama Perum Bulog Cabang Baubau, Jumat (11/9/2026). Kepala Perum Bulog Cabang Baubau Ritno menjelaskan setiap penerima memperoleh beras medium sebanyak 10 kilogram per bulan sehingga jatah tiga bulan diberikan sekaligus dalam tiga karung. "Pelaksanaannya kami lakukan satu kali penyaluran sehingga penerima manfaat langsung mener-

Lanjut ke Hal: 7

Teror Video Pribadi Tak Pantas Mantan Kekasih Disebar ke Ibu dan Teman Lewat Whatsapp, Pria Baubau Diamankan Polisi

ANCAM SEBAR VIDEO PRIBADI
Korban diteror berulang kali melalui WhatsApp.

DISEBAR KE IBU DAN TEMAN
Konten juga dikirim ke ibu korban, Ayu Rezki Karlina, serta diunggah di Facebook.

DITANGKAP DI BONE
Pelaku HD alias AC (35) diamankan pada 14 Agustus 2026 di rumah orang tuanya.

BARANG BUKTI

- 1 unit HP OPPO Reno8T
- 2 akun Facebook
- 1 kartu SIM Telkomsel

DIJERAT PASAL BERLAPIS
Pasal 407 KUHP juncto UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dengan ketentuan pornografi.

ANCAMAN HUKUMAN
PENJARA MAKSIMAL 10 TAHUN atau denda minimal Rp200 juta.

KONFERENSI PERS POLRES BAUBAU

**Laporan: Firman,
Baubau
Post-Durasi Times**

BAUBAU, BP- Hubungan asmara yang berakhir diduga berujung pada penyebaran foto dan video pribadi seorang perempuan di Kota Baubau. HD alias AC (35), warga Kecamatan Wolio, diamankan polisi setelah diduga berulang kali menyebarkan konten tidak pantas yang menampilkan mantan kekasihnya, YF alias YS (27), melalui sejumlah platform digital sejak Januari hingga Agustus 2026.

Kasus tersebut terbongkar setelah korban melaporkan dugaan teror dan penyebaran konten pribadi kepada Sat Reskrim Polres Baubau pada 8 Juli 2026. Sebelum laporan dibuat, korban disebut beberapa kali mendapat ancaman melalui WhatsApp. Polisi kemudian meminta keterangan tiga saksi dan mengamankan sejumlah barang bukti untuk mengembankan penyelidikan.

Lanjut ke Hal: 7

Pimpin HKTI Buton, Bupati Alvin Bidik Penguatan Ekonomi dan Kesejahteraan Petani



Laporan: La Harman

BUTON, BP- Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra, S.H. dipercaya memimpin Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himnunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Buton. Kepemimpinan tersebut diarahkan untuk memperkuat komunikasi pemerintah den-

Lanjut ke Hal: 7

Ertina Pimpin SDN 9 Lakudo Sejak 2019, Sekolah Makin Asri dan Tertata, Siswa Bertambah dan Pembangunan Perpustakaan Jadi Prioritas

Laporan: Ardi

BUTON TENGAH, BP- Kepala SD Negeri 9 Lakudo Bute Ertina, S.Pd.SD., menempatkan penguatan kualitas pembelajaran dan pembenahan sarana sebagai bagian penting dalam pengembangan sekolah sejak dipercaya menjabat pada 2 Januari 2019. Selama tujuh tahun kepemimpinannya, lingkungan sekolah diperbaiki, sejumlah fasilitas direhabilitasi, sementara kebutuhan ruang



perpustakaan masih menunggu tindak lanjut setelah pembaruan data sekolah dilakukan.

Salah satu perubahan yang paling terlihat berada pada lingkungan sekolah. Ertina yang sebelumnya telah mengajar di sekolah itu sejak 2007 melanjutkan sejumlah program kepala sekolah terdahulu, kemudian menata kembali taman dan penghijauan. Langkah tersebut dilakukan

Lanjut ke Hal: 7

Bupati Azhari Gandeng Kemendagri Cegah Sengketa Batas Desa di Buton Tengah



Laporan: Ardi

BUTON TENGAH, BP- Penegasan batas desa mulai diarahkan tidak hanya untuk menghasilkan kepastian administratif, tetapi juga mencegah konflik sosial dan kerusakan lingkungan. Pendekatan itu diterapkan Direktorat Pembinaan Pemerintahan Desa (Ditjen Bina Pemdes) Kementerian Dalam Negeri melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Skrining Analisis Risiko Lingkungan dan Sosial dalam Penegasan Batas Desa di Aula Lantai V Kantor Bupati Buton Tengah, Jumat (11/9/2026).

Bimtek tersebut diikuti tiga kabupaten, yakni Buton Tengah, Muna, dan Muna Barat. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mengidentifikasi risiko sejak tahap awal agar proses penegasan batas berlangsung lebih akurat, partisipatif, dan tidak berkembang menjadi sengketa antardesa. Penyerahan rompi lapangan secara simbolis kepada koordinator teknis dari masing-masing kabupaten menandai dimulainya penguatan kapasitas tim pengumpul data.

Bupati Buton Tengah Dr. H. Azhari, S.STP., M.Si., menga-

takan batas desa tidak semestinya dipahami sebatas garis administratif di atas peta. Menurut dia, proses tersebut berkaitan langsung dengan ruang hidup masyarakat dan keberlanjutan lingkungan, terutama karena Buton Tengah memiliki karakter bentang alam karst serta potensi wisata speleologi. "Penegasan batas desa bukan sekadar menarik garis administratif di atas peta, tetapi juga bagian dari perlindungan ruang hidup masyarakat dan kelestarian lingkungan," kata Azhari.

Lanjut ke Hal: 7

Komisi II DPR Soroti Wacana Perpanjangan Jabatan Kepala Desa



Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB Muhammad Khozin mempertanyakan usul perpanjangan masa jabatan kepala desa oleh Asosiasi Kepala Desa Akhir Masa Jabatan (AMJ) saat bertemu Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, Rabu (9/9).

Laporan: Rahmat

JAKARTA, BP- Usulan memperpanjang masa jabatan kepala desa setelah berakhirnya masa tugas menuai sorotan dari Komisi II DPR RI. Anggota Komisi II dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, menilai perpanjangan jabatan tanpa pemilihan berpotensi mengganggu mekanisme demokrasi di tingkat desa.

Polemik itu mencuat setelah sejumlah kepala desa yang tergabung dalam Koordinator Kepala Desa Akhir Masa Jabatan (AMJ) menemui Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Jakarta, Rabu (9/9). Mereka meminta kepala desa yang telah menyelesaikan masa jabatannya dapat kembali menjalankan tugas sebagai penjabat (pj) kepala desa.

Kelompok tersebut juga meminta pemerintah daerah tidak menunjuk penjabat kepala desa dari aparatur sipil negara (ASN). Mereka beralasan, keberlanjutan kepemimpinan oleh kepala desa sebelumnya dinilai dapat menjaga kesinambungan program sekaligus mendukung efisiensi anggaran.

Bahkan, para kepala desa AMJ mengusulkan agar pemilihan kepala desa (pilkades) dapat dihapus-

kan untuk periode tertentu. Mereka menyebut sekitar 36 ribu kepala desa secara nasional akan mengakhiri masa jabatan pada rentang 2026 hingga 2029.

Ketua Umum Kepala Desa AMJ, Jaro Muhadi, mengatakan perpanjangan jabatan dapat menjadi salah satu cara mengurangi biaya penyelenggaraan pilkades ketika pemerintah sedang menjalankan kebijakan efisiensi anggaran. “Dengan diperpanjang masa jabatan kepala desa, akan mengurangi biaya penyelenggaraan pilkades sejalan dengan efisiensi anggaran saat ini,” kata Jaro dalam pertemuan tersebut.

Namun, Khozin menilai alasan fiskal tidak cukup untuk menghapus atau menunda proses pemilihan kepala desa. Menurut dia, tidak terdapat kondisi luar biasa atau force majeure yang mengharuskan pilkades ditiadakan.

“Saat ini tidak ada force majeure. Persoalan fiskal tak dapat dijadikan alasan penundaan pilkades, apalagi sampai ditiadakan,” ujar Khozin, Jumat (11/9).

Khozin juga mempertanyakan dasar yuridis, sosiologis, dan filo-

sosif dari gagasan memperpanjang masa jabatan tanpa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih kembali pemimpinnya. Baginya, pergantian kepemimpinan secara berkala merupakan bagian dari mekanisme demokrasi di desa.

“Ciri demokrasi di antaranya adalah pemimpin yang dipilih (official elected). Pemilihan kepala desa secara berkala merupakan esensi demokrasi di tingkat desa,” katanya.

Secara historis, rezim hukum desa memang mengalami perubahan. UU Nomor 6 Tahun 2014 sebelumnya mengatur masa jabatan kepala desa enam tahun dan dapat dijabat paling banyak tiga kali masa jabatan. UU tersebut juga menegaskan bahwa kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa melalui pemilihan yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Ketentuan tersebut kemudian berubah melalui UU Nomor 3 Tahun 2024. Regulasi yang berlaku sejak 25 April 2024 itu menetapkan masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun dengan batas paling banyak dua kali masa jabatan, baik berturut-turut

maupun tidak berturut-turut. Perubahan tersebut sebelumnya dibahas DPR bersama pemerintah dan menjadi salah satu poin penting revisi UU Desa.

Dalam konteks global, perdebatan mengenai keberlanjutan pemerintahan lokal dan partisipasi warga juga berkaitan dengan prinsip tata kelola demokratis. Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 16 menempatkan pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif, dan representatif pada semua tingkatan sebagai salah satu target pembangunan.

Karena itu, Khozin mengingatkan bahwa penghapusan atau penundaan pilkades tanpa dasar yang kuat dapat menciptakan preseden bagi demokratisasi di tingkat lokal. “Apa jadinya kalau forum menyerap aspirasi ini ditiadakan atau ditunda. Ini bisa jadi preseden tidak baik dalam demokratisasi di Indonesia,” ujarnya. Bagi Komisi II, efisiensi anggaran tetap penting, tetapi tidak semestinya menghilangkan ruang masyarakat desa untuk menentukan pemimpinnya. (*)

Kemendagri Turunkan Tim Mediasi, Konflik Bupati Masinton dan DPRD Tapteng Memanas



Mendagri Tito Karnavian merespons usul pemakzulan dari DPRD Tapanuli Tengah terhadap Bupati Masinton Pasaribu dengan menurunkan tim mediasi.

MEDAN, BP- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menurunkan tim ke Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara, untuk memediasi konflik antara Bupati Masinton Pasaribu dan sejumlah pimpinan partai politik yang memiliki kursi di DPRD setempat.

Langkah tersebut diambil setelah muncul wacana pemakzulan terhadap Masinton yang sebelumnya disuarakan lima partai politik, yakni NasDem, Golkar, Gerindra, PAN, dan PKB.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membenarkan keterlibatan Kemendagri dalam upaya penyelesaian persoalan tersebut. Ia mengatakan tim dari kementeriannya telah turun langsung ke Tapteng untuk melakukan mediasi.

“Sudah ada tim dari Kemendagri yang turun ke sana,” kata Tito setelah menghadiri pertemuan Tingkat Menteri Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) ke-32 di Hotel JW Marriott Medan, Rabu (9/9) malam.

Tito tidak memerinci tahapan maupun hasil mediasi yang dilakukan antara DPRD Tapteng dan Bupati Masinton. Ia hanya menegaskan bahwa kedatangan tim Kemendagri berkaitan dengan upaya mediasi kedua pihak.

“Iya untuk mediasi,” ujar Tito. Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution turut meminta persoalan tersebut segera diselesaikan. Menurut dia, perseteruan antara kepala daerah dan pimpinan DPRD jangan sampai menghambat penyelenggaraan pemerintahan karena dampaknya akan dirasakan langsung masyarakat.

“Mudah-mudahan selesailah. Saya inginnya selesai karena yang kasihan masyarakat,” kata Bobby pada Rabu malam.

Bobby juga mengingatkan bahwa Tapteng merupakan salah satu daerah di Sumatera Utara yang cukup parah terdampak banjir dan longsor pada 2025. Kondisi tersebut membuat kelancaran penyaluran bantuan kepada masyarakat menjadi perhatian pemerintah provinsi.

“Apalagi itu daerah bencana dan kita tahu Tapteng itu salah satu daerah yang hari ini penyaluran bantuannya masih sedikit lambat dibandingkan daerah lain,” ungkapnya.

Wacana pemakzulan bermula dari pertemuan lima partai politik pada Jumat (4/9). Dalam forum

tersebut, mereka membahas sejumlah persoalan yang dinilai mengganggu jalannya pemerintahan Tapteng, termasuk pengelolaan anggaran dan penanganan bencana.

Juru bicara pertemuan lima pimpinan partai, Hazmi Arif Simatupang dari Gerindra, sebelumnya menilai roda pemerintahan Tapteng tidak berjalan optimal. Ia juga menyoroti dugaan buruknya pengelolaan anggaran daerah.

“Ini disebabkan banyaknya penyelewengan anggaran. Kami mewacanakan serta mempertimbangkan untuk mengambil sikap politik melalui DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah sampai pada tingkat pemakzulan terhadap Bupati Masinton Pasaribu,” kata Hazmi, Sabtu (5/9).

Hazmi menyebut penyerapan APBD Tapteng Tahun Anggaran 2026 hingga Agustus baru berada di kisaran 30 persen. Menurut dia, rendahnya serapan anggaran tersebut menjadi persoalan serius karena berpotensi menghambat pembangunan dan pelayanan publik.

“Berdasarkan informasi yang kami peroleh, penyerapan APBD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2026 hingga Agustus baru mencapai sekitar 30 persen. Ini menjadi catatan serius dan sangat memprihatinkan,” ujarnya.

Selain masalah anggaran, lima partai tersebut menyoroti penanganan banjir di Tapteng. Mereka menilai respons pemerintah daerah serta distribusi bantuan kepada warga terdampak belum berjalan maksimal. Hazmi juga menyebut TAPD dan sejumlah OPD telah dipanggil serta mengingatkan Kemendagri terkait kondisi tersebut.

“Masih banyak masyarakat yang mengeluhkan penyaluran bantuan banjir. Bahkan sejumlah protes muncul karena bantuan dinilai belum tersalurkan secara baik,” katanya.

Namun, sikap politik tersebut kemudian mengalami perubahan. DPC Gerindra Tapteng menyatakan menarik diri dari pernyataan bersama terkait wacana pemakzulan Masinton. Gerindra menyebut tidak lagi terlibat dalam pernyataan sikap bersama tersebut.

Sebelumnya, Hazmi dalam sebuah video menyatakan lima partai duduk bersama untuk menyikapi kondisi kepemimpinan Masinton yang dinilai lalai dan lemah dalam menjalankan roda pemerintahan. Perubahan sikap Gerindra tersebut terjadi ketika Kemendagri mulai mengambil langkah mediasi untuk meredakan konflik politik di Tapteng. (Alwan)

Andi Sumangerukka Terpilih Aklamasi Periode 2026-2031, HKTI Sultra Bidik Kesejahteraan Petani



Laporan: Lisna

SULTRA, BP-Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sulawesi Tenggara memasuki babak baru setelah Gubernur Sultra Andi Sumangerukka ditetapkan secara aklamasi sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) HKTI Sultra periode 2026-2031. Penetapan itu berlangsung dalam rangkaian Musyawarah Daerah (Musda) HKTI Sultra di Aula Serbaguna Kantor Gubernur Sultra, Kamis (10/9/2026).

Kepengurusan baru tersebut langsung diperkuat dengan pelantikan 17 Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HKTI kabupaten/kota se-Sultra oleh Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI Abdul Kadir Karding. Mayoritas ketua DPC merupakan bupati dan wali kota se-Sultra, sehingga organisasi diharapkan memiliki jalur yang lebih kuat untuk menerjemahkan kepentingan petani ke dalam kebijakan daerah.

Andi mengatakan keterlibatan langsung kepala daerah dalam kepengurusan HKTI merupakan peluang untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pertanian, mulai dari produksi hingga kesejahteraan petani. Menurut dia, posisi tersebut juga dapat

memperkuat ketahanan pangan daerah melalui kebijakan yang lebih responsif terhadap kondisi di lapangan.

“Petani bukan hanya produsen pangan. Petani adalah penjaga kehidupan. Di tangan petanilah beras, jagung, serta berbagai komoditas perkebunan dan hortikultura dihasilkan,” kata Andi.

Ia menilai HKTI tidak cukup hanya menjadi organisasi yang menampung aspirasi. Organisasi tersebut harus mampu meningkatkan kapasitas petani, memperluas jaringan, serta mendorong perubahan posisi petani dari sekadar pelaku produksi menjadi bagian penting dari rantai ekonomi pertanian. Para penyuluh juga diminta mengambil peran lebih besar dalam proses tersebut.

“Petani itu bukan pekerja biasa, tetapi petani itu menjadi profesi atau menjadi pekerjaan yang mulia. Dan saya yakin dengan adanya para bupati, wakil bupati dan wali kota yang menjabat sebagai ketua DPC, tujuan kita untuk meningkatkan kesejahteraan petani akan terlaksana,” ujarnya.

Bagi Sultra, penguatan kelembagaan petani menjadi penting karena daerah ini memiliki potensi pertanian, perkebunan, dan hortikultu-

ra yang dapat memberikan nilai tambah lebih besar apabila didukung kebijakan pemerintah, akses pembiayaan, teknologi, serta pasar. Andi juga melihat jejaring DPN HKTI, termasuk hubungan Abdul Kadir Karding dengan Menteri Pertanian, sebagai modal untuk membantu mengatasi keterbatasan yang dihadapi pemerintah daerah.

Abdul Kadir Karding mengatakan pelantikan 17 DPC tersebut harus menjadi titik awal untuk menjadikan HKTI sebagai instrumen strategis bagi peningkatan kesejahteraan petani. Fokus organisasi, kata dia, tidak berhenti pada konsolidasi internal, tetapi diarahkan pada penguatan kelembagaan ekonomi petani, kaderisasi dan regenerasi petani, serta pembukaan akses pasar yang lebih luas.

“Kita berharap HKTI menjadi instrumen strategis, alat strategis bagi petani untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran,” kata Abdul Kadir.

Dorongan tersebut sejalan dengan arah kebijakan pangan nasional. Pemerintah pada Januari 2026 mengumumkan Indonesia mencapai swasembada pangan 2025, setelah sebelumnya target terse-

but diproyeksikan membutuhkan waktu empat tahun. Pemerintah juga menempatkan swasembada pangan sebagai salah satu fondasi kemandirian nasional.

Secara historis, isu ketahanan pangan bukan persoalan domestik semata. Krisis pangan global pada awal 1970-an mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa menggelar World Food Conference di Roma pada 1974. Konferensi tersebut melahirkan berbagai agenda kerja sama internasional, termasuk pembentukan Committee on World Food Security dan penguatan sistem peringatan dini terhadap krisis pangan.

Dalam konteks itu, Abdul Kadir mendorong HKTI Sultra melakukan transformasi pertanian dengan memperkuat organisasi petani, mempercepat regenerasi, membangun kelembagaan ekonomi, dan memperluas akses pasar hingga ekspor. Ia menegaskan potensi pertanian Sultra harus diubah menjadi nilai ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat tani. “HKTI harus menjadi organisasi solusi bagi petani. Kita ingin petani semakin kuat, mandiri, produktif, memiliki akses pasar yang luas dan mampu meningkatkan kesejahteraannya,” tegasnya. (*)

Gubernur Andi Sumangerukka Lepas Ekspor Perdana 1.027 Ton Tepung Tapioka dan Minyak Kelapa Sultra ke China-Malaysia



Laporan: Mashuri

SULTRA, BP-Sulawesi Tenggara mulai membuka jalur ekspor langsung komoditas pertanian dari daerah asal ke pasar internasional. Sebanyak 1.027 ton produk pertanian dilepas menuju China dan Malaysia, Kamis (10/9/2026), sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat hilirisasi dan meningkatkan nilai tambah komoditas lokal.

Ekspor tersebut terdiri atas 900 ton tepung tapioka tujuan China dan 127 ton minyak kelapa mentah (crude coconut oil) tujuan Malaysia. Komoditas itu diekspor PT Agri Cassava Makmur dari Desa Arongo, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan.

Gubernur Sultra Andi Sumangerukka mengatakan ekspor langsung tersebut penting karena selama ini sebagian komoditas unggulan daerah dikirim melalui wilayah lain, terutama Makassar dan Surabaya. Akibatnya, daerah pengirim berikutnya tercatat sebagai daerah pengeksport, sementara Sultra tidak memperoleh posisi yang semestinya dalam rantai perdagangan internasional.

“Banyak komoditi unggulan pertanian Sultra yang selama ini diekspor melalui daerah lain seperti Makassar dan Surabaya. Akibatnya, daerah lain yang tercatat sebagai daerah pengeksport, sementara Sultra tidak tercatat sebagai daerah pengeksport komoditas pertanian maupun perkebunan,” kata Andi.

Menurut Andi, potensi produksi pertanian Sultra harus diikuti pengolahan di daerah agar tidak berhenti sebagai bahan mentah. Hilirisasi dinilai dapat meningkatkan nilai ekonomi produk, memperluas pasar, membuka lapangan kerja, serta memperbesar manfaat ekonomi bagi petani dan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya kualitas, keamanan, dan keberlanjutan sebagai syarat mempertahankan pasar ekspor.

“Ini merupakan momentum yang sangat penting, strategis, dan membanggakan bagi Provinsi Sultra karena dapat melaksanakan pelepasan ekspor perdana secara langsung komoditas hasil pertanian daerah Sultra,” ujarnya.

Dorongan tersebut sejalan dengan perkembangan perdagangan komoditas singkong di Asia. FAO mencatat singkong telah lama menjadi bahan penting untuk pangan, pakan, dan industri, sementara perdagangan produk olahannya berkembang terutama di kawasan Asia. Pada dekade 1990-an, Thailand dan Indonesia termasuk pemasok penting pasar dunia, sedangkan China dan Malaysia menjadi bagian dari pasar utama produk pati singkong.

Dalam konteks Indonesia, ekspor komoditas pertanian juga merupakan bagian dari struktur perdagangan luar negeri nasional. Badan Pusat Statistik secara rutin mencatat ekspor berdasarkan sektor, komoditas, negara tujuan, dan provinsi asal barang. Pencatatan berdasarkan daerah asal menjadi penting karena menunjukkan kontribusi suatu wilayah dalam aktivitas perdagangan internasional.

Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Kadir Karding menilai ekspor perdana tersebut dapat menjadi pijakan untuk meningkatkan volume ekspor Sultra. Menurut dia, pelaku usaha harus memastikan produk memenuhi persyaratan negara tujuan, mulai dari aspek kesehatan, mutu, kualitas hingga kredibilitas. “Yang penting para pengusaha atau UMKM ini, standar kesehatan, kualitas, mutu dan kredibilitas terpenuhi. Kalau itu terpenuhi, ekspor bisa dilaksanakan dengan baik,” katanya.

Karding menyebut hilirisasi menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah, mencakup pertanian, perikanan, dan energi. Selain meningkatkan produksi dan intensifikasi, pemerintah mendorong pembangunan industri pengolahan agar bahan baku dari daerah tidak seluruhnya keluar tanpa proses peningkatan nilai tambah. Ia juga mengapresiasi keberadaan Tim Percepatan Ekspor Sultra dalam mendorong komoditas daerah memasuki pasar yang lebih luas.

Anggota Komisi IV DPR RI asal Sultra Jaelani menilai pertanian memiliki posisi strategis dalam perekonomian daerah. Ia menyebut sektor pertanian menyumbang sekitar 23 persen terhadap PDRB Sultra, lebih tinggi dibandingkan pertambangan sekitar 21 persen dan perdagangan sekitar 20 persen. “Artinya, sektor pertanian ini adalah potensi yang sangat luar biasa untuk kita kembangkan,” kata Jaelani.

Pelepasan ekspor itu turut dihadiri Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Kadir Karding, Jaelani, unsur Forkopimda Sultra, Wakil Bupati Konawe Selatan, kepala OPD lingkup Pemprov Sultra, serta instansi vertikal. Gubernur Sultra dan Karding juga meninjau fasilitas produksi PT Agri Cassava Makmur, mulai dari pengolahan bahan baku, produksi tepung tapioka, pengemasan hingga produk jadi yang siap dikirim ke pasar ekspor.

Sebelum pengiriman, komoditas diperiksa oleh Karantina Indonesia dan selanjutnya dilakukan pemasangan segel yang disaksikan Gubernur Sultra. Tahapan tersebut menjadi bagian dari pengendalian mutu dan pemenuhan persyaratan perdagangan lintas negara. Bagi Sultra, ekspor 1.027 ton itu bukan sekadar pengiriman komoditas, tetapi juga upaya menggeser posisi daerah dari pemasok bahan baku menjadi wilayah yang mampu menghasilkan produk olahan berdaya saing di pasar global. (*)

Rahman Serahkan KUA-PPAS Perubahan 2026, DPRD Butur Mulai Membahas



Laporan:Firman

BURANGA, BP- Pemerintah Kabupaten Buton Utara mulai mengarahkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 pada program yang dinilai lebih prioritas, efektif, dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat. Langkah itu ditandai dengan penyerahan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) kepada DPRD Butur, Rabu (2/9/2026).

Penyerahan dokumen dilakukan Wakil Bupati Buton Utara Rahman, SKM., M.Kes., kepada Wakil Ketua DPRD Butur Patriah, S.Pd., M.H., dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Buton Utara. Dokumen tersebut selanjutnya menjadi bahan pembahasan bersama antara pemerintah daerah dan legislatif dalam tahapan perubahan APBD 2026.

Rahman mengatakan, penyesuaian anggaran diperlukan agar kebijakan fiskal daerah tetap sejalan dengan perkembangan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Karena itu, perubahan APBD tidak sekadar mengubah angka pendapatan maupun belanja,

tetapi harus memperkuat prioritas pembangunan daerah.

“Rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026 merupakan instrumen penting dalam menyesuaikan kebijakan dan prioritas pembangunan daerah dengan perkembangan kondisi serta kebutuhan masyarakat,” ujar Rahman.

Ia meminta pembahasan antara Pemerintah Kabupaten Buton Utara dan DPRD dilakukan secara konstruktif, transparan, dan akuntabel. Proses tersebut diharapkan menghasilkan keputusan anggaran yang tetap berada dalam koridor ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah, kata Rahman, juga berkomitmen memilah program dan kegiatan yang benar-benar menjadi prioritas. Pengalokasian anggaran diarahkan agar lebih efektif dan efisien sehingga memiliki dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Pemerintah daerah berkomitmen mengarahkan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 pada program dan kegiatan yang prioritas, efektif, efisien, serta memberikan manfaat

nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Secara kelembagaan, pembahasan perubahan APBD merupakan bagian dari mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang menempatkan pemerintah daerah dan DPRD sebagai dua unsur penting dalam proses penganggaran. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menetapkan APBD sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui DPRD dan ditetapkan melalui peraturan daerah.

Dalam perkembangannya, sistem penganggaran daerah juga menempatkan KUA dan PPAS sebagai dokumen penting untuk menjembatani perencanaan pembangunan dengan pengalokasian anggaran. Pedoman Kemendagri menjelaskan bahwa perubahan KUA dan PPAS dapat disusun ketika perkembangan pendapatan, belanja, pembiayaan, atau asumsi anggaran tidak lagi sesuai dengan kondisi yang ditetapkan sebelumnya.

Konteks tersebut membuat perubahan APBD tidak se-

mestinya dipahami sebagai proses administratif semata. Perubahan anggaran harus mempertimbangkan waktu pelaksanaan program, capaian sasaran kinerja, serta kemampuan daerah merealisasikan kegiatan pada sisa tahun anggaran. Kemendagri juga menempatkan perubahan RKPD sebagai salah satu dasar penyusunan perubahan KUA dan PPAS.

Rapat paripurna penyerahan dokumen tersebut turut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Butur, Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara, para staf ahli bupati, asisten sekretaris daerah, kepala OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara, serta Direktur RSUD Kabupaten Buton Utara.

Penyerahan rancangan perubahan KUA dan PPAS itu sekaligus membuka tahapan pembahasan arah kebijakan dan alokasi anggaran Buton Utara untuk tahun berjalan. Pemerintah daerah dan DPRD selanjutnya memiliki ruang untuk mencermati kembali prioritas program sebelum perubahan APBD 2026 ditetapkan sesuai mekanisme yang berlaku. (*)

Hadiri Maulid di Banabungi, Wabup Buton Syarifuddin Tekankan Pentingnya Akhlak



Laporan:La Harman

BUTON, BP- Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Desa Banabungi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, tidak sekadar menjadi agenda keagamaan. Wakil Bupati Buton Syarifudin Saafa, ST, menjadikannya momentum untuk mendorong penguatan karakter dan akhlak masyarakat sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia di daerah.

Pesan itu disampaikan Syarifudin ketika menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Nurul Huda, Desa Banabungi, Kamis malam, 3 September 2026. Peringatan tersebut mengangkat tema “Teladan Nabi, Akhlak Mulia, Bekal Diri Menuju Selamat Bahagia” dan diikuti masyarakat setempat serta tamu undangan.

Menurut Syarifudin, kemajuan daerah tidak dapat hanya diukur melalui pembangunan infrastruktur. Kualitas manusia yang memiliki karakter, akhlak, serta landasan keagamaan juga menjadi modal penting agar pembangunan memberikan manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan.

“Cara membenengi suatu daerah adalah dengan mengadakan acara yang seperti ini, majelis zikir dan ilmu. Pembinaan karakter tidak bisa lepas dari kegiatan keagamaan seperti ini,” kata Syarifudin.

Ia mengajak masyarakat menjadikan Rasulullah SAW sebagai rujukan dalam membangun perilaku kehidupan sehari-hari. Salah satu

sifat yang dinilai penting untuk diteladani adalah kejujuran dan amanah, sebagaimana sosok Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan julukan Al-Amin, atau orang yang dapat dipercaya.

“Peningkatan sumber daya manusia, bagaimana menumbuhkan karakter, akhlak yang sesuai dengan ajaran agama kita sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW,” ujarnya.

Syarifudin juga mengaitkan penguatan karakter tersebut dengan visi Buton sebagai daerah yang religius. Menurut dia, kegiatan keagamaan seperti majelis zikir dan ilmu dapat menjadi ruang pembinaan masyarakat sekaligus memperkuat hubungan sosial di tengah kehidupan bermasyarakat.

“Dengan agama yang kuat, akan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat,” katanya.

Peringatan Maulid di Masjid Nurul Huda berlangsung khidmat sekaligus meriah. Majelis Taklim Nurul Hidayah Desa Banabungi mempersembahkan selawat Nabi, sedangkan siswa-siswi SD Negeri 25 Buton menampilkan tarian dan vokal grup Islami. Anak-anak juga antusias mengikuti tradisi berebut telur dari pohon male yang telah menjadi bagian dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Banabungi setiap tahun.

Secara historis, peringatan Maulid telah berkembang dalam tradisi mas-

yarakat Muslim selama berabad-abad. Sejumlah sumber sejarah mencatat adanya peringatan kelahiran Nabi di Madinah dan Makkah pada masa Abbasiyah, sementara riwayat lain menyebut perayaan besar berkembang pada masa Dinasti Fatimiyah dan kemudian dilakukan secara luas oleh penguasa Muslim di berbagai wilayah. Karena itu, sejarah awal Maulid memiliki sejumlah versi di kalangan sejarawan.

Di Indonesia, Maulid kemudian tumbuh menjadi tradisi keagamaan sekaligus sosial yang memiliki bentuk beragam di setiap daerah. Peringatan digelar di masjid, pesantren, majelis taklim hingga lingkungan masyarakat dengan bentuk kegiatan seperti selawatan, pengajian dan tradisi lokal. Tradisi tersebut memperlihatkan bagaimana penghormatan terhadap Nabi Muhammad SAW beradaptasi dengan kebudayaan masyarakat setempat.

Bagi masyarakat Banabungi, tradisi itu kembali dihidupkan melalui pertemuan warga, selawat, penampilan seni Islami dan tradisi telur male. Di tengah rangkaian tersebut, pesan Wabup Buton menempatkan Maulid bukan hanya sebagai peringatan sejarah kelahiran Rasulullah SAW, tetapi juga sebagai sarana menanamkan keteladanan, kejujuran, amanah, dan akhlak kepada generasi berikutnya. (*)

Kemenkes Pastikan BIAS Tetap Berjalan, Kasus Siswi Karo Dinilai Koinsiden



Laporan: Mashuri

JAKARTA, BP- Kementerian Kesehatan memastikan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) tetap berjalan sesuai jadwal setelah Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (Komnas KIPI) menyatakan kondisi serius yang dialami seorang siswi di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, tidak memiliki hubungan kausal dengan vaksin Human Papillomavirus (HPV).

Hasil kajian kausalitas Komnas KIPI mengategorikan kejadian tersebut sebagai inkonsisten atau koin-siden. Kesimpulan itu berarti kondisi yang dialami siswi dinilai berkaitan dengan kondisi penyerta di luar vaksin, sehingga tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan vaksin HPV sebagai penyebab kejadian.

Ketua Komnas KIPI Prof. Dr. dr. Hindra Irawan Satari menjelaskan, siswi tersebut didiagnosis mengalami meningoensefalitis, yaitu peradangan pada selaput dan jaringan otak. Kondisi klinis

yang dilaporkan antara lain demam tinggi, penurunan kesadaran, kejang hingga koma.

“Berdasarkan hasil kajian, KIPI tersebut diklasifikasikan sebagai inkonsisten atau koin-siden. Artinya, berdasarkan data dan bukti yang tersedia, kejadian yang dialami tidak disebabkan oleh vaksin HPV,” ujar Hindra.

Kesimpulan tersebut diperoleh setelah investigasi lapangan pada 16 Agustus 2026 dan kajian kausalitas pada 20 Agustus 2026. Pemeriksaan melibatkan Direktorat Imunisasi Kemenkes, Sekretariat Komnas KIPI, Komda KIPI Sumatera Utara, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, serta Dinas Kesehatan Kabupaten Karo.

Tim juga tidak menemukan kesalahan dalam pelaksanaan imunisasi. Vaksin diberikan secara intramuskular dengan dosis 0,5 mililiter. Vaksin bernomor batch 40103725 tersebut memiliki masa kedaluwarsa 24 Agustus 2027, sementara pemeriksaan rantai dingin tidak menemukan

vaksin kedaluwarsa, kerusakan fisik, ataupun indikasi pembekuan.

Direktur Imunisasi Kemenkes dr. Indri Yogyakarta mengatakan keamanan anak menjadi prioritas dan setiap dugaan KIPI serius tetap diperiksa berdasarkan data klinis serta bukti ilmiah. “Pelaksanaan imunisasi, termasuk melalui program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS), tetap dilanjutkan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku,” katanya.

Secara historis, BIAS bukan program baru. Program imunisasi berbasis sekolah telah dikembangkan pemerintah sejak dekade 1980-an dan berkembang menjadi BIAS pada 1998. Program tersebut kemudian menjadi salah satu instrumen nasional untuk memberikan imunisasi ulang kepada anak sekolah guna mempertahankan perlindungan terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.

Khusus vaksin HPV, Indonesia mulai melakukan introduksi melalui BIAS di DKI Jakarta pada 2016. Program itu kemu-

dian diperluas secara bertahap hingga akhirnya dilaksanakan secara nasional pada 2023. WHO mencatat pemberian HPV bagi anak perempuan sekolah dilakukan melalui BIAS, dengan sasaran utama kelas 5 dan 6 SD pada skema yang berlaku saat itu.

Secara global, penggunaan vaksin HPV berkembang setelah vaksin tersebut mulai digunakan di Amerika Serikat pada 2006. Kemenkes mencatat penurunan signifikan infeksi HPV penyebab sebagian besar kanker HPV dan kutil kelamin pada remaja perempuan setelah program vaksinasi berjalan.

Kemenkes dan pemerintah daerah kini memperkuat pelaksanaan BIAS melalui pembinaan vaksinasi, skrining sasaran, pengelolaan vaksin dan rantai dingin, tata laksana KIPI, serta kesiapan KIPI Kit dan sistem rujukan. Pemerintah juga mengajak orang tua, sekolah, tenaga kesehatan, dan masyarakat mendukung imunisasi sebagai bagian dari perlindungan kesehatan anak.(*)

Putri Mahkota Swedia Kagum pada Kemajuan Genomik Kesehatan Indonesia



Peliput: Lisna

JAKARTA, BP- Kemajuan teknologi genomik Indonesia mendapat perhatian Putri Mahkota Swedia Victoria Ingrid Alice D  sir  e saat mengunjungi Balai Besar Biomedis dan Genomika Kesehatan (BB Binomika) di Gedung Eijkman, Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta, Jumat (4/9). Kunjungan tersebut menjadi kesempatan bagi pemerintah memperlihatkan pengembangan kedokteran presisi melalui program Biomedical and Genomic Science Initiative (BGSi).

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan perkembangan genomik memungkinkan dunia kedokteran bergerak melampaui pendekatan yang selama ini berfokus pada pencarian patogen seperti virus dan bakteri. Dengan membaca materi genetik manusia, dokter dan peneliti dapat mengidentifikasi risiko penyakit serta merancang penanganan yang lebih sesuai dengan karakteristik biologis pasien.

“Dulu ilmuwan berfokus pada patogen. Virus COVID-19 misalnya, hanya memiliki sekitar 30 ribu pasangan basa (base pairs) DNA, sedangkan manusia memiliki 3 miliar pasangan basa,” kata Budi saat menjelaskan perkembangan teknologi tersebut kepada delegasi Swedia.

Menurut Budi, pemetaan genom diperlukan karena karakteristik genetik setiap populasi berbeda. In-

formasi tersebut dapat digunakan untuk mengetahui kecenderungan seseorang terhadap penyakit tertentu, termasuk kanker payudara yang berkaitan dengan mutasi gen BRCA1 dan BRCA2. Jika mutasi terdeteksi melalui proses sequencing, intervensi dapat dilakukan lebih dini.

Indonesia sendiri mulai membangun BGSi sebagai inisiatif nasional pada 2022. Kementerian Kesehatan saat itu menyebut BGSi sebagai program nasional pertama yang dirancang untuk mendeteksi potensi penyakit pada masa depan sekaligus mengembangkan precision medicine. Program tersebut memanfaatkan whole genome sequencing terhadap manusia dan patogen.

Pengembangan itu kini berlangsung di Gedung Eijkman, lokasi yang memiliki jejak panjang dalam sejarah ilmu kedokteran di Indonesia. Nama gedung tersebut merujuk pada Christiaan Eijkman, ilmuwan Belanda yang melakukan penelitian mengenai beri-beri di Jawa pada akhir abad ke-19. Penelitiannya mengenai zat dalam kulit ari beras kemudian berkontribusi pada pemahaman tentang vitamin B1 dan mengantarkannya meraih separuh Nobel Fisiologi atau Kedokteran 1929 bersama Sir Frederick Gowland Hopkins.

Warisan penelitian tersebut menjadi konteks penting bagi pengembangan genomik Indonesia saat ini. Jika penelitian Eijkman lebih dari satu abad lalu berangkat dari pengamatan terhadap penyakit dan nutrisi, teknologi genomik mod-

ern memungkinkan peneliti membaca variasi DNA dalam skala jauh lebih besar untuk memahami risiko penyakit secara lebih presisi.

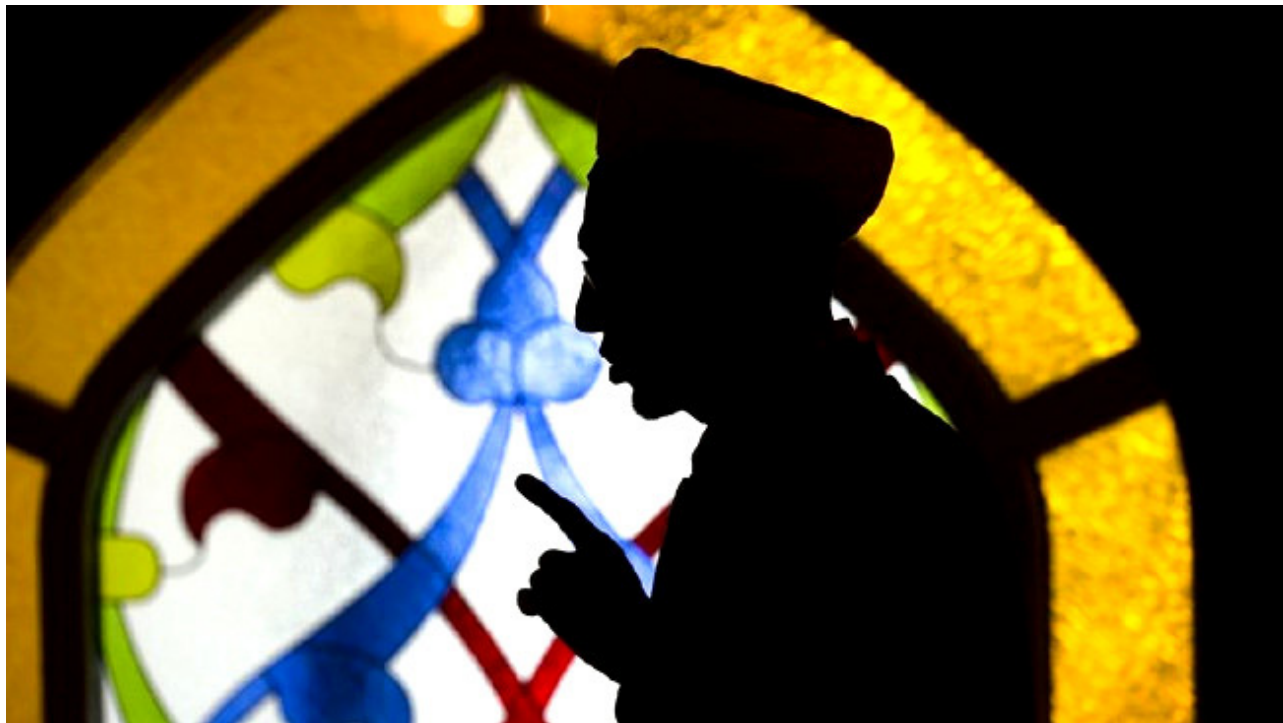
Dalam kunjungan tersebut, Budi mengungkapkan delegasi Swedia sebelumnya tidak menyangka Indonesia telah menjalankan program genomik dalam skala nasional. Ia menyebut pengembangan serupa selama ini lebih dikenal berada di negara-negara maju seperti negara-negara Eropa, Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Emirat Arab. “Crown Princess Victoria begitu melihat ini, beliau kagum bahwa Indonesia mampu melakukannya,” ujar Budi.

Skala pengelolaan data menjadi salah satu tantangan utama program tersebut. Kementerian Kesehatan kini memiliki kapasitas penyimpanan 4,2 petabyte data genomik dan menargetkan meningkatkannya menjadi 10 petabyte. Data itu dapat dianalisis menggunakan pipeline yang tersedia maupun kecerdasan buatan (AI) untuk membantu mendeteksi risiko penyakit berat sejak lebih awal.

Budi berharap kunjungan kenegaraan Putri Mahkota Swedia yang berlangsung hingga 8 September 2026 dapat membuka peluang kerja sama strategis kedua negara, terutama dalam pengembangan riset, pendanaan, donasi teknis, dan pengelolaan big data. “Kita tentu berharap ke depannya ada dukungan program melalui pendanaan atau donasi teknis, terutama karena inisiatif ini membutuhkan kapasitas pengelolaan big data yang luar biasa besar,” katanya.(*)

PT FAREN GRAFIKA KRITIK, LUGAS, DAN INDEPENDEN Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam melakukan tugas jurnalistik Dalam Pelaksanaan Tugas, Wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu, masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post Segala berita yang diterbitkan oleh Baubau Post meruoakan tanggung jawab penanggungjawab redaksi	Pemimpin Umum: Fauzan NWA Penanggungjawab/Pemimpin Redaksi: Ardi Redpel: Prasetyo Korlip: Firman Redaktur: Kasrun,Rahim Reporter: Mashuri, Lisna, Asis, Hafid, Amat Jr, Noval, La Harman	Layouter: Ririn Pracetak: Aditya Cetak Jamaludin	Penerbit: PT FAREN GRAFIKA Komisaris: Erna Agule Direktur Utama: Andina Latief Manager Keuangan: Nabila DAA Manager Iklan & Pemasaran: Jamaluddin Kepala Sirkulasi: Robi Administrasi: Salvana	Kepala Biro Wakatobi: Risman Kepala Biro Buton Utara: Kasrun Kepala Biro Buton: La Harman Kepala Biro Buton Selatan: Firman Kepala Biro Buton Tengah: Komarudin Kepala Biro Sultra: Masuri Agen Baubau: Jamaluddin Agen Buton Selatan: Firman Agen Buton: Samrihan Agen Buton Utara: Kasrun Harga dan Langganan: Dalam Kota Baubau 100.000/bulan, Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim Eceran dalam Kota Baubau Rp 5000/eks
Alamat Redaksi/Tata usaha: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara Tlp 0402-2014287- Email: baubaupost2019@gmail.com, ardiandina7786@gmail.com Percetakan: PT Faren Grafika, Alamat:Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara				

Laporan Belum Dicabut, Polisi Tetap Dalam Dugaan Penghinaan Nabi oleh Abah Setu



Polisi masih menyelidiki laporan dugaan penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW yang menyeret pimpinan Majelis Dzikir Nurul Hikam, Asep Setiawan alias Abah Setu.

Laporan: Amran

JAKARTA, BP- Permintaan maaf Asep Setiawan alias Abah Setu tidak serta-merta menghentikan penanganan laporan dugaan penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Polres Metro Bekasi memastikan penyelidikan tetap berjalan karena laporan yang berkaitan dengan video viral tersebut hingga Jumat (11/9) belum dicabut.

Kapolres Metro Bekasi Kombes Andi Oddang mengatakan kepolisian masih menyesuaikan langkah penanganan berdasarkan laporan yang telah diterima. Polisi juga mempertimbangkan perkembangan setelah proses klarifikasi dan mediasi yang melibatkan sejumlah unsur masyarakat.

"Untuk laporan kan sudah ada, sudah dilaporkan nanti kita menyesuaikan langkah-langkah ke depannya," kata Andi kepada wartawan, Jumat (11/9).

Menurut Andi, sikap MUI Kabupaten Bekasi dan masyarakat yang telah memberikan maaf kepada Abah Setu tidak otomatis

menghapus proses hukum. Ia menegaskan, sejauh ini belum terdapat pencabutan laporan sehingga penyelidikan tetap berlangsung.

"Masih (berproses), sementara belum ada (pencabutan laporan)," ujar Andi.

Perkara tersebut bermula dari beredar video yang diduga memuat pernyataan menghina Nabi Muhammad SAW. Pada Senin (7/9) malam, sejumlah warga mendatangi Majelis Dzikir Nurul Hikam yang dipimpin Abah Setu di Desa Telajung, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, untuk meminta penjelasan mengenai video tersebut.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan personel Polres Metro Bekasi bersama Polsek Cikarang Barat langsung mendatangi lokasi ketika warga berkumpul. Polisi meminta masyarakat tidak mengambil tindakan sendiri dan menyerahkan dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum.

Klarifikasi dan mediasi kemudian berlangsung pada Kamis (10/9). Per-

temuan itu dihadiri unsur MUI Kabupaten Bekasi, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan. Dalam forum tersebut, Abah Setu menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya yang menimbulkan keberatan di tengah masyarakat.

"Dalam forum tersebut, Asep Setiawan menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya yang menimbulkan keberatan di tengah masyarakat," kata Budi dalam keterangannya, Kamis.

Meski permintaan maaf telah disampaikan, Budi menyatakan kepolisian belum menutup penanganan perkara. Informasi dan keterangan yang telah diperoleh dari berbagai pihak masih dalam tahap pendalaman untuk menentukan langkah berikutnya.

Secara historis, persoalan dugaan penghinaan terhadap simbol atau figur agama di Indonesia kerap beririsan dengan persoalan kebebasan berekspresi, ketertiban umum, dan penegakan hukum. Pemerintah Indonesia se-

jak era reformasi juga memperkuat mekanisme penyelesaian perkara melalui institusi hukum untuk mencegah konflik sosial berkembang menjadi tindakan main hakim sendiri.

Di tingkat internasional, isu penghinaan terhadap tokoh atau simbol agama juga berulang kali memicu perdebatan mengenai batas kebebasan berpendapat dan penghormatan terhadap keyakinan. Karena itu, penanganan kasus semacam ini umumnya menempatkan proses hukum dan pencegahan konflik sosial sebagai dua hal yang berjalan beriringan.

Dalam kasus Abah Setu, polisi kini masih mendalami laporan yang telah masuk sembari menjaga situasi di tengah masyarakat. Sampai laporan tersebut dicabut atau kepolisian menentukan langkah hukum berikutnya berdasarkan hasil penyelidikan, perkara dugaan penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW masih berada dalam proses penanganan. (*)

KPK Geledah Rumah Tiga Wakil Rektor Unsoed dan Ruang Sekda Banyumas



KPK melakukan serangkaian penggeledahan di enam lokasi untuk barang bukti kasus dugaan pemerasan mahasiswa baru di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed).

Laporan: Hadi

JAKARTA, BP- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memperluas pencarian barang bukti dalam perkara dugaan pemerasan atau gratifikasi terkait penerimaan mahasiswa baru di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed). Penyidik menggeledah enam lokasi di Banyumas dan Tasikmalaya pada 9-10 September 2026.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, lokasi yang digeledah meliputi rumah Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, dan Wakil Rektor IV Unsoed. Penyidik juga mendatangi rumah seorang dosen, ruang Sekretaris Daerah (Sekda) Banyumas, serta rumah seorang guru SMA di Tasikmalaya.

"Serangkaian penggeledahan tersebut yakni di lokasi rumah tiga Wakil Rektor I, II, dan IV; rumah salah satu dosen; ruang Sekda Banyumas; serta rumah salah satu guru SMA di Tasikmalaya yang diduga sebagai koordinator pengumpul calon mahasiswa," ujar Budi melalui keterangan tertulis, Jumat

(11/9/2026).

Penggeledahan di ruang Sekda Banyumas dilakukan karena pejabat tersebut diduga mengetahui pemberian rekomendasi bagi calon mahasiswa yang telah memberikan sejumlah uang agar dapat diterima di Unsoed.

Dari rangkaian penggeledahan itu, penyidik menemukan sejumlah dokumen dan Barang Bukti Elektronik (BBE). Barang bukti tersebut antara lain berkaitan dengan dugaan praktik penitipan calon mahasiswa di Unsoed.

"Penyidik menemukan sejumlah dokumen dan Barang Bukti Elektronik (BBE), di antaranya yang terkait dengan penitipan calon mahasiswa di Unsoed," kata Budi.

Penggeledahan terbaru ini merupakan lanjutan dari kegiatan penyidikan yang dilakukan KPK sebelumnya. Pada 23 dan 24 Agustus 2026, penyidik telah menggeledah enam rumah tersangka serta gedung kantor rektorat Unsoed.

Dalam penggeledahan di kantor rektorat, KPK menemukan Surat Edaran (SE) KPK tahun 2023 yang berisi rekomen-

dasi perbaikan proses penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri. Salah satu poin dalam surat tersebut menekankan pentingnya peningkatan transparansi mengenai jumlah kuota penerimaan dan kriteria kelulusan calon mahasiswa.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan enam orang sebagai tersangka. Mereka adalah Rektor Unsoed Akhmad Sodik, Wakil Rektor III Unsoed Norman Arie Prayoga, Kepala Bagian Akademik Unsoed Eko Sumanto, serta tiga pihak swasta, yakni Dian Mulia Wardhana, Adhi Wiharto, dan Mulyono.

Penetapan tersangka tersebut merupakan tindak lanjut Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Purwokerto dan Jakarta. Setelah OTT, KPK melakukan pemeriksaan intensif sejak Kamis, 20 Agustus 2026.

Para tersangka telah ditahan untuk masa penahanan tahap pertama selama 20 hari, terhitung sejak 21 Agustus hingga 9 September 2026, di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK. (*)

Teror Video Pribadi Tak Pantas Mantan Kekasih Disebar ke Ibu dan Teman Lewat Whatsapp, Pria Baubau Diamankan Polisi

“Korban diteror berulang kali oleh pelaku melalui WhatsApp dengan ancaman akan menyebarkan video yang menayangkan diri korban,” kata Kanit Tipiter Sat Reskrim Polres Baubau, Ipda Hendra, dalam konferensi pers di ruang Humas Polres Baubau, Kamis (10/9/2026).

Penyidik menyebut penyebaran konten tersebut tidak hanya ditujukan kepada korban. Pada 10 Januari 2026, korban mendapat informasi dari Ayu Rezki Karlina mengenai video yang dikirim melalui WhatsApp. Pada Maret, ibu korban juga menerima video serupa. Polisi menduga pelaku kemudian menyebarkan foto dan video melalui WhatsApp serta Messenger kepada ibu dan teman korban, termasuk mengunggah foto korban berulang kali pada kolom komentar akun Facebook RSUD Kota Baubau.

Menurut polisi, tindakan itu dilakukan untuk menekan korban agar mengikuti keinginan pelaku. Setelah konten disebarkan, pelaku diduga melakukan tangkapan layar dan mengirimkannya kembali kepada korban. “Tujuannya agar korban merasa takut sehingga mengikuti semua kemauan pelaku,” ujar Hendra.

Upaya penyidik menghadirkan

HD sempat terkendala setelah dua kali panggilan pemeriksaan tidak dipenuhi. Polisi kemudian menerbitkan surat perintah membawa. HD akhirnya diamankan pada 14 Agustus 2026 di rumah orang tuanya di Desa Kadding, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, oleh personel Unit I dan Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Baubau dengan dukungan Tim Opsnal Polres Bone.

Dalam pemeriksaan, HD disebut mengakui perbuatannya. Polisi menduga motifnya berkaitan dengan rasa sakit hati setelah hubungan dengan korban berakhir secara sepihak. Penyidik juga menyebut tersangka memperoleh sejumlah video dengan merekam secara diam-diam ketika bersama korban serta merekam layar saat keduanya melakukan panggilan video. “Perbuatan tersebut dilakukan berulang kali sejak Januari hingga Agustus 2026,” kata Hendra.

Polisi menyita satu unit telepon seluler OPPO Reno8T, dua akun Facebook

atas nama Azka Pradana Iwan dan Jalak Bali, serta satu kartu SIM Telkomsel. Tersangka kini ditahan di Mapolres Baubau dan, berdasarkan keterangan penyidik, dijerat Pasal 407 ayat KUHPidana juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dengan ketentuan pidana terkait pornografi, dengan ancaman penjara paling lama 10 tahun atau denda kategori IV minimal Rp200 juta.

Kasus Baubau ini berada dalam konteks persoalan kekerasan berbasis teknologi yang berkembang secara global. Di Indonesia, perlindungan terhadap korban kekerasan digital telah berkembang melalui sejumlah regulasi, termasuk aturan mengenai hak penghapusan konten sejak Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2019. Secara internasional, sejumlah negara juga memperkuat hukum terhadap penyebaran gambar intim tanpa persetujuan; UN Women mencatat tindakan tersebut sebagai salah satu bentuk kekerasan yang difasilitasi teknologi dan dapat berdampak hingga kehidupan korban di luar ruang digital. (*)

Bantuan Beras 30 Kg Menjangkau Warga di 70 Desa dan Kelurahan di Buton Selatan, Bulog Pastikan Beras Gratis, Bupati H Muh Adios Minta Bantuan Beras Disalurkan Tepat Sasaran

ma 30 kilogram atau tiga karung sekaligus,” kata Ritno.

Ritno memastikan masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkan bantuan tersebut. Penegasan itu penting karena seluruh proses distribusi bantuan pangan merupakan bagian dari program pemerintah yang ditujukan kepada keluarga penerima manfaat. “Jadi penerima manfaat mendapatkan beras tidak dipungut biaya sepeser pun,” ujarnya.

Bupati Adios meminta pemerintah kecamatan, desa, dan kelurahan ikut mengawal distribusi hingga bantuan diterima warga yang tercantum sebagai penerima. Menurut dia, pengawasan diperlukan untuk mencegah kebocoran maupun penyalahgunaan data sehingga bantuan benar-benar memberikan manfaat kepada kelompok sasaran. “Bantuan ini harus benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak. Tidak boleh ada kebocoran maupun penyalahgunaan

data penerima,” tegas Adios.

Program tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga, tetapi juga diarahkan untuk menopang daya beli masyarakat. Secara nasional, program bantuan pangan beras telah berjalan sejak 2023 dengan skema 10 kilogram per keluarga penerima manfaat setiap bulan. Pada 2023, bantuan dialokasikan bagi sekitar 21,3 juta penerima selama tujuh bulan dengan total beras sekitar 1,4 juta ton, sementara pada 2024 alokasinya mencapai 22 juta penerima selama sembilan bulan.

Kebijakan semacam itu memiliki konteks lebih panjang dalam sejarah ketahanan pangan. FAO mencatat beras telah menjadi pangan pokok bagi lebih dari separuh penduduk dunia dan pada 2004 Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan International Year of Rice untuk menegaskan pentingnya komoditas tersebut bagi pangan dan pengentasan kelaparan. Dalam sejarah Indonesia

dan Asia, peningkatan produksi beras sejak era Revolusi Hijau juga berperan besar dalam memperkuat ketersediaan pangan.

Di sisi pasokan, Bulog Cabang Baubau menyatakan stok beras di gudang saat ini sekitar 2.000 ton. Persediaan tersebut dinilai masih mencukupi kebutuhan wilayah layanan Bulog, termasuk mendukung penyaluran bantuan pangan. “Untuk stok kebutuhan beras di wilayah Perum Bulog masih cukup, karena kita masih mempunyai stok 2.000 ton,” ujar Ritno.

Bagi Busel, penyaluran bantuan tiga bulan sekaligus diharapkan meringankan beban pengeluaran rumah tangga penerima manfaat sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Dengan cakupan 70 desa dan kelurahan, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan stok, tetapi juga ketepatan data, transparansi distribusi, dan pengawasan pemerintah daerah sampai ke tingkat paling bawah. (*)

Ertina Pimpin SDN 9 Lakudo Sejak 2019, Sekolah Makin Asri dan Tertata, Siswa Bertambah dan Pembangunan Perpustakaan Jadi Prioritas

Sebelumnya dinilai masih relatif tandus. “Kalau program sebelumnya baik, saya lanjutkan. Kemudian ada hal-hal yang perlu diperbaiki di sekolah ini,” kata Ertina.

Pembenahan fisik juga berlangsung selama masa kepemimpinannya. Dua bangunan sekolah direhabilitasi, disertai pembangunan atau perbaikan pagar, musala, dan toilet melalui dukungan program pemerintah. Perubahan tersebut menjadi bagian dari upaya menyediakan lingkungan belajar yang lebih layak bagi peserta didik.

Dari sisi penerimaan murid, sekolah tetap menjadi salah satu pilihan masyarakat sekitar meski berada di tengah keberadaan sejumlah sekolah dasar lain. Target awal penerimaan adalah satu rombongan belajar setiap tahun dan umumnya tercapai. Pada 2026 sekolah menargetkan dua rombel, tetapi baru satu rombel yang terealisasi dengan jumlah siswa meningkat hingga sekitar 28 orang. “Yang kita targetkan memang satu rombel dan itu tercapai. Tahun ini targetnya dua rombel, tetapi yang tercapai baru satu dengan jumlah siswa yang meningkat,” ujarnya.

Kebutuhan yang masih menjadi perhatian adalah ruang perpustakaan. Selama ini sekolah memanfaatkan ruang kelas untuk fungsi tersebut sehingga pencatatan pada Dapodik sebelumnya membuat sekolah tercatat memiliki perpustakaan. Setelah mendapat masukan dari dinas pendidikan dan BPMP, data itu diperbaiki dengan mencatat bahwa sekolah belum memiliki ruang perpustakaan khusus. Perubahan data tersebut kini menjadi bagian dari proses pengusulan bantuan.

Bupati Azhari Gandeng Kemendagri Cegah Sengketa Batas Desa di Buton Tengah

Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Dr. Drs. La Ode Ahmad Pidana Balombo, AP., M.Si., menilai skrining risiko diperlukan untuk membaca potensi persoalan sebelum penegasan batas dilakukan. Instrumen tersebut mencakup identifikasi kemungkinan dampak sosial dan lingkungan sehingga keputusan di lapangan tidak semata-mata bertumpu pada aspek administratif. “Penilaian risiko awal penting untuk mengantisipasi potensi konflik sosial sekaligus menjaga kawasan konservasi,” ujarnya.

Secara historis, persoalan batas desa bukan hal baru dalam tata kelola pemerintahan Indonesia. Kemendagri telah memiliki Permenagri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa, sebelum kemudian hadir Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Regulasi tersebut menempatkan proses penegasan batas melalui tahapan antara lain pelacakan garis batas, pemasangan pilar, pengukuran, penentuan posisi pilar, dan pembuatan peta garis batas.

Kebutuhan terhadap kepastian batas semakin penting setelah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memperkuat posisi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pamban-

Sementara itu, kondisi tenaga pendidik dinilai relatif mencukupi. Sekolah memiliki 12 orang, terdiri atas Ertina sebagai kepala sekolah, tujuh PNS, tiga P3K penuh waktu, satu P3K paruh waktu, dan satu tenaga honorer. Ertina menyebut jumlah tersebut bahkan terdapat satu tenaga yang lebih. Ia juga mengapresiasi kedisiplinan guru, termasuk tiga guru yang berdomisili di Kota Baubau dan harus menggunakan speedboat, tetapi tetap tiba sebelum pukul 06.30 dan pulang sesuai waktu kerja.

Pembenahan sekolah tersebut berada dalam konteks perjalanan panjang pendidikan Indonesia. Sejak awal kemerdekaan, pendidikan ditempatkan sebagai bagian penting pembangunan bangsa; Ki Hadjar Dewantara bahkan dipercaya menjadi Menteri Pengajaran pertama pada 19 Agustus 1945. Sebelumnya, pada 3 Juli 1922, ia mendirikan Taman Siswa sebagai bagian dari perjuangan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Di tingkat global, pendidikan dasar juga menjadi agenda pembangunan internasional. UNESCO mencatat pendidikan sebagai instrumen penting pembangunan dan kemudian SDG 4 menetapkan sasaran pendidikan yang inklusif, bermutu, serta kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua.

Karena itu, Ertina menegaskan pengembangan sekolah tidak berhenti pada pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan kualitas proses belajar. Guru bersama pihak sekolah, kata dia, terus mengevaluasi pembelajaran agar peserta didik berkembang secara akademik maupun karakter. “Kami bersama guru-guru selalu berkomitmen untuk terus memajukan siswa. Kami terus mengevaluasi proses pembelajaran agar anak-anak bangsa bisa menjadi lebih cerdas,” katanya. (*)

Pimpin HKTI Buton, Bupati Alvin Bidik Penguatan Ekonomi dan Kesejahteraan Petani

gan petani, meningkatkan nilai tambah hasil pertanian, serta mendorong kesejahteraan keluarga petani.

Alvin menegaskan pemerintah tidak dapat membangun sektor pertanian hanya dari sisi peningkatan produksi. Rantai usaha dari produksi, pengelolaan hasil hingga pemasaran perlu dibangun secara bersama agar kerja keras petani menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar. “Petani harus mendapatkan nilai yang lebih baik dari hasil kerjanya. Ini yang harus kita pikirkan bersama,” kata Alvin.

Amanah tersebut diterima Alvin dalam Musyawarah Daerah (Musda) DPD HKTI Provinsi Sulawesi Tenggara di Aula Serba Guna Kantor Gubernur Sultra, Kendari, Kamis (10/9/2026). Ia dilantik Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI H. Abdul Kadir Karding. Dalam forum yang sama, Gubernur Sultra Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka menerima

Surat Keputusan sebagai Ketua DPD HKTI Sultra periode 2026-2031.

Menurut Alvin, HKTI harus berfungsi sebagai ruang komunikasi dan penyalur aspirasi petani. Organisasi itu diharapkan membantu pemerintah memperoleh gambaran langsung mengenai kebutuhan petani sekaligus menjadi ruang bersama untuk merumuskan solusi atas persoalan sektor pertanian di Kabupaten Buton. “Kita ingin pertanian Buton berkembang bersama para petani. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Kita harus mendengar kebutuhan petani dan bekerja bersama untuk mengembangkan potensi yang kita miliki,” ujarnya.

Pandangan tersebut sejalan dengan perubahan arah pembangunan pertanian dunia. Pengalaman Revolusi Hijau sejak dekade 1960-an menunjukkan bahwa peningkatan produktivitas melalui benih unggul, irigasi dan teknologi mampu mening-

katkan produksi pangan secara signifikan. Namun, pengalaman itu juga memperlihatkan pentingnya memperkuat posisi petani dalam sistem produksi dan pasar. FAO mencatat produktivitas padi di Asia meningkat tajam pada periode tersebut, tetapi akses terhadap pasar, teknologi, modal dan kelembagaan tetap menjadi faktor penting bagi keberlanjutan petani.

Indonesia sendiri pernah mencapai swasembada beras pada 1984 setelah melalui rangkaian kebijakan pembangunan irigasi, penggunaan varietas unggul dan program Revolusi Hijau. Capaian tersebut menjadi salah satu tonggak penting sejarah pertanian nasional. Karena itu, tantangan berikutnya bukan sekadar menghasilkan komoditas, tetapi memastikan petani memperoleh nilai ekonomi yang lebih besar dari komoditas yang mereka hasilkan.

Alvin mengatakan pemerintah akan terus membuka ruang

kerja sama dengan kelompok tani dan seluruh pihak yang memiliki perhatian terhadap kemajuan pertanian Buton. HKTI diharapkan ikut mengarahkan pengembangan sektor tersebut berdasarkan potensi daerah, sekaligus memperkuat hubungan antara petani, pemerintah dan pelaku usaha. “Kita punya banyak potensi. Tinggal bagaimana kita kelola bersama supaya petani semakin maju dan kese-

jahteraannya ikut meningkat,” kata dia.

Dengan posisi baru tersebut, HKTI Buton diharapkan tidak berhenti sebagai wadah organisasi, tetapi menjadi instrumen untuk memperkuat posisi petani dari hulu hingga hilir. Penguatan rantai nilai pertanian dinilai penting karena pasar yang berfungsi baik dapat menghubungkan petani dengan pengolahan, perdagangan dan konsumen, sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan petani. (*)

Yusran Fahim Dorong Penegakan Hukum SDA yang Transparan dan Berkelanjutan



Laporan: Prasetyo M

KENDARI, BP- Penguatan penegakan hukum di sektor sumber daya alam (SDA) menjadi perhatian Pemerintah Kota Baubau. Wali Kota Baubau H. Yusran Fahim, S.E., menghadiri Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara bersama PT ANTAM di Hotel Claro, Kendari, Selasa (8/9/2026), untuk membahas penegakan hukum, pemulihan aset, serta tata kelola SDA yang berkelanjutan.

Menurut Yusran, keterlibatan pemerintah daerah dalam forum tersebut penting untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah, aparat penegak hukum dan badan usaha milik negara (BUMN). Ia menilai tata kelola SDA tidak cukup hanya mengandalkan aspek ekonomi, tetapi harus disertai kepastian hukum, transparansi dan keberlanjutan. "Kehadiran kami dalam forum strategis ini merupakan bentuk komitmen Pemkot Baubau mendukung penegakan hukum yang berkelanjutan dan tata kelola sumber daya alam yang transparan," kata Yusran.

FGD mengusung tema "Penegakan Hukum dan Pemuli-

han Aset SDA: Membangun Keadilan Restoratif, Legal Resilience, dan Tata Kelola Berkelanjutan". Forum tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan dalam menangani perkara tindak pidana di bidang SDA, terutama setelah berlakunya KUHP dan KUHP baru pada 2 Januari 2026. Reformasi hukum pidana itu disebut sebagai bagian dari perubahan sistem hukum pidana Indonesia menuju hukum yang lebih sesuai dengan kebutuhan nasional.

Pembahasan tidak hanya diarahkan pada tindakan penegakan hukum, tetapi juga pada pendekatan restoratif, restitutif dan rehabilitatif. Dengan pendekatan tersebut, proses hukum diharapkan tidak berhenti pada penghukuman, tetapi turut mempertimbangkan pemulihan kerugian, aset, lingkungan dan kepentingan masyarakat yang terdampak.

Kegiatan yang berlangsung pukul 07.00 hingga 16.30 WITA itu dihadiri Gubernur Sulawesi Tenggara Mayjen (Purn.) H. Andi Sumangerukka, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Dr. Sugeng Riyanta, Direktur Utama

PT ANTAM, serta Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia. Sejumlah unsur penegak hukum dan kementerian terkait juga dijadwalkan menjadi narasumber, antara lain Kabareskrim Polri, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan, Ketua Komisi Kejaksaan RI, Ketua Komisi Yudisial dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.

Isu tersebut memiliki konteks yang lebih luas. Secara nasional, pengelolaan SDA selama puluhan tahun berhadapan dengan persoalan perizinan, kerusakan lingkungan, konflik pemanfaatan ruang, hingga pemulihan aset hasil tindak pidana. Karena itu, penguatan koordinasi antarlembaga menjadi penting agar penegakan hukum tidak berjalan sendiri-sendiri dan manfaat SDA dapat kembali kepada negara serta masyarakat.

Dalam konteks global, prinsip environmental rule of law semakin ditempatkan sebagai bagian penting pembangunan berkelanjutan. Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) menilai kepastian dan penegakan hukum lingku-

ng merupakan fondasi tata kelola yang berkelanjutan. UNEP juga mencatat konflik sumber daya alam dapat memperbesar risiko kerentanan sosial ketika eksploitasi menimbulkan kerusakan lingkungan, hilangnya mata pencaharian, atau ketimpangan pembagian manfaat.

Yusran mengatakan, sinergi pemerintah daerah dengan aparat penegak hukum dan BUMN diperlukan untuk memastikan pengelolaan SDA berlangsung sesuai aturan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat. "Kami ingin sinergi pemerintah daerah, aparat penegak hukum dan BUMN terus diperkuat sehingga tata kelola SDA di Sulawesi Tenggara semakin transparan, berkeadilan dan berkelanjutan," ujarnya.

Ia berharap forum tersebut menghasilkan penguatan kapasitas dan kesamaan perspektif antarlembaga dalam menghadapi persoalan hukum SDA. Bagi Pemkot Baubau, penegakan hukum yang efektif harus berjalan beriringan dengan pemulihan aset, perlindungan lingkungan, kepastian hukum dan kepentingan masyarakat. (*)

Perpustakaan Waliabuku Jalani Visitasi Lomba Terbaik Tingkat Sultra



Laporan: Andina

BAUBAU, BP- Perpustakaan Kelurahan Waliabuku, Kecamatan Bungi, Kota Baubau, memasuki tahap penting dalam Lomba Perpustakaan Kelurahan Terbaik Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2026. Tim penilai dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan visitasi langsung ke perpustakaan tersebut, Rabu (9/9/2026), untuk menguji pengelolaan, pelayanan, fasilitas, koleksi, hingga inovasi literasi yang dikembangkan bagi masyarakat.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara bersama rombongan tim penilai hadir dalam visitasi tersebut. Tim didampingi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Baubau untuk melihat kondisi perpustakaan secara langsung sekaligus memastikan berbagai komponen yang menjadi objek penilaian dapat diverifikasi di lapangan.

Camat Bungi Hasrun, S.IP., mengatakan visitasi merupakan bagian dari tahapan penilaian untuk melihat kemampuan perpustakaan dalam menjalankan fungsi pelayanan publik di tingkat kelurahan. "Tim penilai melihat secara langsung pengelolaan, pelayanan, serta berbagai inovasi yang dikembangkan perpustakaan kelurahan," kata Hasrun dalam siaran persnya, Rabu (9/9/2026).

Penilaian mencakup sejumlah aspek yang menentukan kualitas sebuah perpustakaan. Tim meninjau kondisi sarana dan prasarana,

tata kelola, koleksi bahan bacaan, pelayanan kepada masyarakat, serta program dan inovasi yang diarahkan untuk meningkatkan minat baca dan literasi warga.

Bagi Pemerintah Kecamatan Bungi, lomba tersebut bukan sekadar kompetisi antarkelurahan. Keberadaan perpustakaan yang aktif diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap bahan bacaan dan informasi sekaligus menjadi ruang pembelajaran di luar pendidikan formal.

Hasrun menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Baubau dan masyarakat yang mendukung pengembangan Perpustakaan Kelurahan Waliabuku. "Dukungan pemerintah daerah dan masyarakat sangat penting dalam memajukan perpustakaan kelurahan," ujarnya.

Peran perpustakaan sebagai ruang pembelajaran masyarakat memiliki akar panjang dalam kebijakan literasi di Indonesia. Perpustakaan Nasional pada 2024 mendorong Gerakan Literasi Desa sebagai upaya memperluas akses membaca dan memperkuat kualitas perpustakaan di tingkat lokal. Dalam gerakan tersebut, pemerintah juga menekankan pentingnya sarana membaca yang memadai, pemanfaatan teknologi digital, serta pelibatan pegiat literasi dan masyarakat.

Pada 2026, Perpustakaan Nasional juga menegaskan arah transformasi perpustakaan agar tidak berhenti pada fungsi penyimpanan buku. Perpustakaan didorong menjadi ruang tumbuh kreativitas,

pembelajaran, dan pengembangan pengetahuan masyarakat di tengah perubahan cara warga memperoleh informasi melalui teknologi.

Dalam konteks global, gagasan tersebut sejalan dengan Manifesto Perpustakaan Umum IFLA-UNESCO yang pertama kali dibuat pada 1949 dan diperbarui pada 2022. Manifesto itu menempatkan perpustakaan umum sebagai bagian penting dari pendidikan, kebudayaan, akses informasi, dan pembangunan masyarakat berbasis pengetahuan.

Pembaruan manifesto tersebut juga menyesuaikan peran perpustakaan dengan perkembangan teknologi dan perubahan sosial. UNESCO dan IFLA menekankan bahwa perpustakaan memiliki peran dalam memperluas akses terhadap pengetahuan, meningkatkan literasi informasi, menghadapi tantangan transformasi digital, serta mendukung pembelajaran sepanjang hayat.

Hasrun berharap proses visitasi menjadi momentum bagi Perpustakaan Kelurahan Waliabuku untuk terus memperbaiki kualitas layanan sekaligus memperkuat posisinya sebagai ruang literasi masyarakat di Kecamatan Bungi. "Kami berharap Perpustakaan Kelurahan Waliabuku mampu memberikan pelayanan yang semakin baik, menjadi salah satu pusat kegiatan literasi masyarakat, dan memberikan hasil terbaik dalam lomba tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2026," katanya. (*)